

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Era globalisasi saat ini dengan perkembangan teknologi kinerja pemerintah menjadi sorotan publik diantaranya yaitu bagaimana pemerintah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, masyarakat semakin membutuhkan kinerja pemerintah yang baik. Ini dapat mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik, laporan keuangan yang baik dengan adanya tuntutan tersebut. Jika pemerintah ingin menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih ditingkatkan. Laporan keuangan pemerintah Indonesia memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja keuangan pemerintah. Laporan keuangan adalah hal yang menarik untuk dikaji, karena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang ada di dalam laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya 2022, BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah (JatimBPK, 2023). Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan

oleh belum diterapkannya sistem informasi akuntansi, kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dan peran internal audit yang masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah peningkatan pada pengaplikasian sistem informasi akuntansi dan juga peningkatan dalam kinerja pengawasan internal audit.

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu tentang pengaduan masyarakat mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik atas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (JatimBPK, 2023). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selama ini bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dimaknai oleh BPK sebagai terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. BPK merupakan bagian dari penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dari segi akuntabilitas dan transparansi, maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan potensi anggaran yang diberikan pada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Utama, masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan kinerja dan masih kurangnya penyajian evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. Transparansi merupakan salah satu unsur tata pemerintah yang baik, istilah tata pemerintahan yang baik merupakan konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawababan atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang pemegang amanah. Hal ini dapat

berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada principal. Sedangkan akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kepada masyarakat dengan memberikan segala informasi yang tentu saja harus transparan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk memepertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait laporan keuangan tersebut (Mardiasmo, 2018).

Laporan keuangan disusun dengan berbagai pertimbangan, hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan lebih baik dan berkualitas. Permasalahan terkait kualitas laporan keuangan pemerintah saat ini belum sepenuhnya dibenahi. Hal ini menyebabkan adanya rasa curiga dari publik kepada pemerintah mengenai kinerja pemerintah yang telah dicapai saat ini. Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah sangat menarik untuk dikaji karena tuntutan akuntabilitas yang kuat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan lembaga publik. Karena fakta bahwa banyak laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang tidak akurat, yang telah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Laporan keuangan yang memiliki kualitas yang rendah dapat disebabkan oleh sistem informasi akuntansi yang belum digunakan atau kurangnya pemahaman akuntansi dari penyusun laporan

keuangan. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan internal audit harus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada sistem akuntansi pemerintah terdapat beberapa ciri penting atau syarat yang diperlukan diantaranya yaitu sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sistem akuntansi pemerintahan dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta di audit. Selain itu sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan program atau evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan (Putra, 2018). Pemerintah harus mampu memanfaatkan dan juga menggunakan suatu teknologi informasi untuk mengelola sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang baik. Karena, laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi dan lainnya untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan. Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, namun informasi yang diambil harus berkualitas dan memiliki nilai. Semakin baik kualitas informasi, keputusan yang diambil akan lebih tepat. Namun, jika informasi yang dihasilkan tidak berkualitas maka berpengaruh pada kepuasan pengguna sistem informasi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelola keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah (Eo et al., 2021).

Faktor penting lainnya yang juga mendukung baiknya kualitas laporan keuangan yaitu kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena laporan keuangan ialah hasil dari disiplin seseorang dengan ilmu akuntansi yang kompeten. Ini adalah konsekuensi dari kurangnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, pemahaman akuntansi adalah komponen penting dalam manajemen keuangan daerah. Sumber daya manusia (SDM) memiliki nilai yang tinggi karena kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka, sehingga sangat penting untuk keberhasilan suatu instansi. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang pada suatu instansi untuk melaksanakan kewajibannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, output yang berkualitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Maka penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan SAP dan perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Karena untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang berkualitas maka laporan keuangan harus disusun oleh seseorang yang paham di bidang akuntansi dan sistem akuntansi.

Peraturan Pmenerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan, karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif agar pelaporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang diinginkan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah untuk dipahami. Begitu juga pada bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmi-ilmu keuangan terkait lainnya (Lestari & Dewi, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Islamay & Trisnaningsih, 2022) dan (Eo et al., 2021) memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, artinya pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian (Yeni et al., 2020) memiliki hasil secara persial mempunyai pengaruh yang signifikan, maka penerapannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pada variabel kompetensi sumber daya manusia, penelitian (Saputra, 2021) memiliki hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada variabel internal audit yang pada penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Dewi, 2020) memiliki hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kesimpulan atas penjelasan tersebut bahwa untuk mendapatkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mengandalkan sistem informasi akuntansi saja tetapi kompetensi sumber daya manusia juga harus diperhatikan.

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam menyelesaikan kerjanya. Dalam melakukan penilaian kualitas laporan keuangan akan dikoreksi terlebih dahulu oleh internal audit, agar mengetahui apabila terdapat penyimpangan. Maka peranan internal audit sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan ketidak konsistenan penelitian terdahulu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Dinas Kota Surabaya”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, internal audit, dan kualitas laporan keuangan.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi tambahan pendukung dan dapat juga untuk menelitian selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **1.4.2.1. Bagi Instansi**

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi sebahai bahan informasi dan masukan guna meningkatkan kinerja



para staff dengan kompensasi dan lingkungan kerja yang sesuai di OPD Kota Surabaya.

#### **1.4.2.2. Bagi Mahasiswa**

- a) Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka pola berpikir lebih luas mengenai disiplin ilmu yang ditekuni selama ini. Serta untuk menyusun suatu Tugas Akhir (TA) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Unuversitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
- b) Mahasiswa dapat membandingkan dan mengaplikasikan teori dan ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan lingkungan kerja yang sebenarnya.

#### **1.4.2.3. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau bahan untuk menambah wawasan serta pemikiran bagi penelitian sejenisnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi yang nyata terhadap teori-teori yang berkaitan dengan persoalan tersebut.